

BAB V

MASALAH YANG MEMPENGARUHI HUBUNGAN AUSTRALIA- INDONESIA PADA MASA MALCOLM FRASER

A. Masalah yang menjadi Motif Hubungan Australia-Indonesia

1. Revolusi Anyelir

Masalah merdeka atau integrasi untuk Timor Timur ditimbulkan karena peristiwa-peristiwa di Portugal. Portugal mengalami pergolakan politik sepanjang tahun 1974. Pada tanggal 25 April 1974 pemerintah Caetano digulingkan revolusi militer atau *Revolusi Anyelir* yang dipimpin Antonio de Spinoza.¹ Pemerintah Portugal yang baru memulai memodernisasikan ekonominya dan menarik kembali secara berangsur-angsur dari jajahan di Afrika dan Asia. Ketika penguasaan Timor Portugis dilepaskan pemerintah Portugal, Timor Portugis diberikan kemerdekaannya.

Saat itu banyak partai politik dibentuk termasuk UDT (Uni Demokratik Timor/ *Uniao Democratica Timorese*), Apodeti (Perhimpunan Demokrasi Rakyat Timor/ *Associacao Popular Democratica da Timorese*), Fretilin (Front untuk kemerdekaan Timor/ *Frente Revolucionario da Timor*), KOTA dan Trabalhista. UDT-Fretilin membentuk front anti-integrasi walaupun Apodeti, dan partai kecil yang lain, mendukung integrasi dengan

¹ Khairul Jasmi. *Euricos Guterres. Melintas Badai Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm. 20

Indonesia.² Sejak pemulaan, Apodeti disokong, secara keuangan dan moril, pemerintah di Jakarta. Sepanjang tahun 1974 Indonesia memelihara pendirian bahwa Indonesia tidak berminat kepada penguasaan Timor Portugis. Betapapun, Indonesia terus menyokong tujuan Apodeti dalam cara non-militer. Akan tetapi Apodeti tidak disokong masyarakat Timor Portugis, sekalipun Jakarta mengatakan sebagian besar penduduk Timor Portugis mendukung Apodeti dan tujuannya integrasi dengan Indonesia.

Pengabungan UDT-Fretilin didukung kebanyakan orang Timor Portugis tetapi pengabungan berantakan sebab perbedaan ideologi antara dua partai dan kecurigaan kepada pihak/partai lain.³ Pada bulan Mei 1975 UDT menarik diri dari pengabungan dan ia menjadi kurang anti-integrasi dan lebih pro-integrasi. Dengan demikian Indonesia memperbesar kampanyenya mengasingkan Fretilin dari masyarakat Timor Portugis, masyarakat Indonesia, dan yang paling penting, negara-negara Barat. Indonesia melakukan ini mengatakan Fretilin adalah partai sosialis/komunis yang mengancam

² Makarim Z.A, dkk. *Hari-hari Terakhir Timor Timur. Sebuah Kesaksian*. Jakarta: Sportif Media Informasindo, 2003. hlm. 19

³ Fretilin adalah akronim bahasa Portugis untuk Front Revolusioner kemerdekaan Timor-Timur, setelah merdeka, partai ini adalah sebuah partai yang memerintah. Sedangkan UDT adalah partai pertama yang dibentuk yang beranggota warga Timor-Timur yang kaya, dan banyak dari mereka adalah pejabat-pejabat pemerintah di Dili yang memiliki perkebunan terkemuka dan sebagian adalah elit pribumi. Awalnya UDT dan Fretilin bergabung dalam anti-integrasi, dan UDT menjadi partai yang pro-integrasi. Lihat Helen Hill, *Stirrings of Nationalism in East Timor: FRETILIN 1975-1978: The Origins, Ideologies and Strategies of a Nationalist Movement*. New South Wales : Otford Press, 2002. Hlm. 302.

Indonesia dan kapitalismenya dan demokrasiya. Akhirnya Fretilin menyatakan kemerdekaannya sebagai *Republica Democratica da Timor Leste* pada tanggal 28 Nopember 1975.⁴ Ini dijawab oleh gerakan pro-integrasi dengan pengumuman Deklarasi Balibo yang merupakan pernyataan integrasi Timor Portugis di dalam Republik Indonesia, pada tanggal 30 Nopember 1975.⁵ Dan kemerdekaan Timor Portugis dialihkan. Pada bagian awal, Proklamasi Integrasi berbunyi,

Kami rakyat Timor-Timur dan daerah-daerah bawahnya dalam hal ini diwakili oleh Apodeti (Associacao Popular Democratica de Timorencs, KOTA (Klibur Oan Timor Aswain) dan partai Trabalista setelah mengadakan analisa dengan seksama, menyesalkan proklamasi kemerdekaan atas wilayah Portugal. Atas nama Allah Yang Maha Kuasa dan berdasarkan alasan yang dikemukakan, kami dengan khitmat menyetakan integrasi dari seluruh wilayah koloni Portugis dengan bangsa Indonesia dan proklamasi ini merupakan pernyataan paling tinggi dari perasaan-perasaan rakyat Timor Portugis”.

Deklarasi Balibo ini ditandatangani oleh Gulherme Maria Gonsalves ketua Presidium dan Alexandriano Borrocue anggota presidium atas nama Partai Apodeti. Dalam deklarasi proklamasi ini dilakukan penurunan bendera

⁴ Khairul Jasmi, *Euricos Guterres. Melintas Badai Politik Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm. 21

⁵ Deklarasi Balibo pada tanggal 30 November 1975, merupakan pernyataan integrasi dari seluruh bekas jajahan Portugal di Timor-Timur dengan bangsa Indonesia dan proklamasi ini merupakan pernyataan paling tinggi dari perasaan-perasaan dari rakyat Timor Portugal. Deklarasi Balibo merupakan tandingan dari proklamasi secara sepihak yang dicetuskan oleh Fretilin di Lapangan Dos Boa Ventura Dili pada tanggal 28 November 1975 yang menyetakan berdirinya Republik Demokrasi Timor-Timur. Hendro Subroto, *Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timor-Timur*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 113.

Portugal dan pengibaran bendera Fretilin. Fransisco Xavier do Amaral menjadi Presiden.

2. *Hilangnya Wartawan Australia di Timor-Timur*

Perebutan Balibo yang diawali dengan serangan mortar pada tanggal 16 Oktober 1975 pukul 06.00 pagi, hanya memakan waktu 45 menit. Salah satu rumah yang digunakan Fretilin hancur dan terbakar diakibatkan tembakan mortar, didalam nya terdapat 15 mayat yang telah hangus terbakar. Jatuhnya Balibo menempati pemberitaan lebih besar di Luar Negeri, hal ini disebabkan hilangnya lima wartawan Australia yang diberitakan sedang meliput pertempuran di Balibo.⁶

Kepala Bakin Letnan Jenderal Yoga Sugama dengan resmi memberitahukan Duta Besar Australia Richard Woolcot, bahwa nasib kelima wartawan Australia dimana seorang diantaranya warganegara Inggris diduga telah turut terbunuh dalam serangan gabungan tentara UDT-APODETI-KOTA ke Balibo pertengahan Oktober 1975. Letnan Yoga menyatakan hal ini setelah pemerintah Indonesia menerima sepucuk surat resmi presidium APODETI, D. Guilherme Maria Gonvalces.

Surat yang bertanggal 3 November itu telah memperinci kelima wartawan Australia, isi surat tersebut berbunyi,

⁶ Hendro Subroto, *op.cit.*, hlm. 81

Bahwa pada pertempuran tanggal 22 Oktober telah gugur 15 orang dari pihak Fretilin , dari korban tersebut terdapat 4 mayat orang kulit putih dalam keadaan terbakar . akan tetapi kami tidak begitu yakin apakah keempat orang kulit putih ini adalah wartawan Australia atau bukan, karena tidak ada bukti nyata dan tidak bisa membuktikannya.

Pemerintah Indonesia kemudian meminta Gonvalces untuk menyelidiki nasib kelima wartawan Australia tersebut, satu team pasukan dikirim kembali ke gedung dimana menjadi tempat pertahanan Fretilin. Setelah diadakan investigasi dan observasi, maka berhasillah ditemukan beberapa dokumen yang diduga adalah milik wartawan tersebut, ketika pasukan tentara APODETI sedang patrol dipinggiran kota Balibo, telah ditemukan sebuah kamera, beberapa dokumen dan dua mayat di hutan dijalur mana Fretilin melarikan diri. Salah satu dari mayat yang telah membusuk itu adalah berkulit putih, demi kesehatan, kedua mayat tersebut dibakar.⁷

3. *Integrasi Timor-Timur kedalam Wilayah RI*

Sesudah Pernyataan Balibo dinyatakan pengabungan UDT-Apodeti-Kota-Trabalhista angkatan-angkatan bersenjata Indonesia menyerbu Timor Portugis supaya melindungi putusan integrasi dengan Indonesia.⁸ Pada

⁷ Tempo, 22 November 1975, hlm. 14.

⁸ Soekanto. *Integrasi : Kebulatan Tekad Rakyat Timor-Timur*, Jakarta: Yayasan Parikesit, 1976. hlm.395.

tanggal 7 Desember 1975, sebelum matahari terbit, Dili- ibu kota Timor Portugis dibom bardir oleh pasukan yang diangkut dengan kapal, dan pasukan-pasukan payung dari Kostrad. Penyerbuannya sekaligus berhasil dan tidak berhasil. Pasukan-pasukan payung mendarat di tempat yang salah, bukan kota Dili, tetapi di atas pasukan Fretilin yang sudah mundur dan kedua belah pihak menderita banyak korban.

Pasukan-pasukan Indonesia tidak bisa menyatukan rakyat Timor Portugis di bawah bendera Republik Indonesia. Pasukan Indonesia memperoleh kekuasaan yang terbatas, akan tetapi ada banyak korban, kerusakan fasilitas umum, dan perlawanan dari pemimpin-pemimpin Indonesia.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah sementara dibentuk oleh penguasa-penguasa Indonesia pada tanggal 17 Desember 1975. Kemudian Majelis Rakyat, yang beranggotakan 37 orang yang dipilih karena mereka mendukung integrasi, memilih integrasi ke dalam Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 17 Juli 1976 Daerah Tingkat I Timor Timur dibentuk, menyusul dikeluarkannya Undang-undang No. 7 1976 tentang penyatuan Timor Timur dengan Republik Indonesia. Timor Timur menjadi

propinsi ke-27 secara resmi dan menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat.⁹

Secara singkat, apa yang terjadi didalam proses pengintegrasian Timor-Timur kedalam wilayah RI ada terjadi dua proses yakni¹⁰ :

1. Berlangsung di Forum Internasional, khususnya melalui kegiatan-kegiatan PBB tentang Timor-Timur, sampai saat ini Indonesia belum berhasil meyakinkan PBB untuk mengakui Timor-Timur sebagai bagian dari Indonesia;
2. Proses berlangsung di Timor-Timur sendiri, dimana terlihat bahwa proses integrasi telah berjalan kearah yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia, meskipun sisa-sisa kekuatan bersenjata Fretilin sampai saat ini masih melakukan resistensi terhadap kehadiran Indonesia di Timor-Timur.

Hubungan baik antara Australia dengan Indonesia mengalami cobaan yang cukup berat setelah munculnya masalah Timor-Timur. Indonesia yang mengintegrasikan wilayah Timor-Timur dengan kekuatan militer mendapat tantangan keras dari berbagai kelompok di Australia. Fraser dengan terpaksa harus memperhatikan suara-suara sebagian masyarakat Australia, dan

⁹ *Ibid*,

¹⁰ Riwanto Tirtosudarmo. (1993). "Proses Integrasi Timor-Timur", *Analisis CSIS, Vol. 22 No, 6*, hlm. 25

mengambil sikap anti-Indonesia dalam siding awal Dewan Keamanan PBB mengenai masalah Timor-Timur, pada bulan Desember 1975.

Pada bulan desember tahun 1976 dalam kesempatan kunjungan Fraser ke Indonesia, Fraser telah memberikan pengakuan *de Facto* Australia terhadap integrasi. Perubahan sikap Fraser terhadap masalah Timor-Timur (de jure) banyak dipengaruhi oleh tekanan-tekanan AS, yang tidak menginginkan rusaknya hubungan Australia dengan Indonesia. Amerika mendesak Fraser untuk tidak mempermasalahkan mengenai Integrasi Timor-Timur kedalam Indonesia.¹¹

Disamping itu perubahan sikap Fraser terhadap masalah Timor-Timur juga dipengaruhi oleh beberapa faktor di dalam negerinya, yakni menguatnya posisi Fraser setelah pemilihan umum 1977, membuatnya tidak perlu mempertahankan gantungan politik dari kelompok yang mempermasalahkan integrasi Timor-Timur.¹² Mengakui Timor-Timur sebagai wilayah Indonesia, juga bukan soal yang mudah bagi Fraser, didalam negerinya sendiri akan menghadapi berbagai golongan yang masih bersimpati pada Fretilin, tidak hanya golongan-golongan yang bersimpati pada Fretilin saja tetapi para wartawan Australia juga tidak akan begitu saja menerima keputusan Fraser dalam mengakui Timor-Timur menjadi wilayah Indonesia sebelum

¹¹ Soekanto, *Integrasi : Kebulatan Tekad Rakyat Timor-Timur*, Jakarta : Yayasan Parikesit, 1976. hlm. 431.

¹² *Ibid.*, hlm. 439.

menyelesaikan soal hilangnya lima wartawan Australia di Timor-Timur pada tahun 1975.¹³ Hal inilah yang membuat Fraser bingung dalam membuat keputusan, jalan yang tampak yang akan dilakukan Fraser adalah perlahan-lahan dalam membuat keputusan tersebut, hingga akhirnya Fraser tidak memiliki pilihan lain kecuali mengakui Timor-Timur sebagai propinsi ke 27 dari Republik Indonesia.

Pada saat integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia, hal ini berdampak dengan kematian lima (5) wartawan Australia di Timor Portugis. Pada bulan Oktober 1975 wartawan-wartawan Australia dibunuh dalam kekerasan antara Fretilin dan gabungan UDT-Apodeti-Kota. Akhir Nopember 1975 Duta Besar Australia Richard Woolcott diberitahukan, dalam secara resmi, Kepala Bakin Letnan Jenderal Yoga Sugama bahwa mayat-mayat lima (5) wartawan Australia diketemukan di Balibo.

Kematian lima wartawan Australia ini membuat Dubes Australia Woolcott mengadakan pertemuan dengan Menteri luar negeri Indonesia yakni Adam Malik pada tanggal 18 Oktober 1975, dalam pertemuan itu Woolcott meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk berusaha mencari wartawan-wartwan Australia yang dikabarkan hilang oleh Fretilin.¹⁴

¹³ *Belum Ada Perubahan Sikap Soal Timor-Timur*, Dalam *Kompas*, Senin, 11 Oktober 1976, hlm. 2.

¹⁴ Soekanto, *op.cit.*, hlm. 433.

Menurut surat resmi yang ditulis oleh Presidium Apodeti¹⁵ D. Guilherme Maria Gonvalces lima belas (15) pendukung Fretilin terbunuh dalam peperangan pada tanggal 22 Oktober, dan ada empat (4) mayat yang kulit putih. Kemudian, partol Apodeti menemukan dua (2) mayat di daerah pinggiran Balibo. Sebuah mayat kulit putih dan mempunyai dokumen-dokumen dan kamera. Walaupun tidak ada bukti yang meyakinkan, dipercaya mayat-mayat ini dimiliki lima (5) wartawan Australia. Reaksi masyarakat Australia terhadap kematian ini menandai adanya dukungan untuk Indonesia, karena kematian terjadi dalam keadaan yang kurang jelas.

Pada tahun 1983 James Dunn, yang mantan Diplomat Australia, menulis laporan tentang proses integrasi Timor Portugis ke dalam Indonesia dan kekerasan yang berjalan terus. Katanya,

The military seizure of East Timor has been a bloody operation, in which atrocities of a disturbing nature have been committed against the civilian population. Indeed, these accounts of Indonesia's behaviour in East Timor suggests that the plight of these people may well constitute, relatively speaking, the most

¹⁵ APODETI adalah sebuah partai di Timor-Timur yang didirikan pada tanggal 27 Juli 1974 dalam dukungan terhadap integrasi otonomi kedalam Republik Indonesia berdasarkan hukum Internasional, Partai ini mendapat dukungan raja-raja lokal terutama liurai dari Atsabe, beberapa bagian dari komunitas Islam pengikutnya hanya dalam jumlah kecil dan dukungannya yang kontroversi terhadap integrasi dengan Indonesia sebagai pilihan ketiga memberikan partai ini profil yang lebih tinggi. Lihat Joseph Nevins. *Pembantaian Timor-Timur: Horor Masyarakat Internasional*. Yogyakarta : Galang Press, 2008, hlm. 25

serious case of contravention of human rights facing the world at this time.’¹⁶

Selain itu, Laporan Dunn termasuk banyak kesaksian saksi mata dari pengungsi di Timor Timur. Hal ini terbukti, reaksi Indonesia terhadap Laporan Dunn sangat kuat sekali. Laporan Dunn merupakan pertama kali tokoh diplomat Australia mencela, dalam secara sangat terbuka, peranan Indonesia di Timor Timur. Keadaan digelorakan lagi waktu Dunn diundang Kongress AS untuk berbicara dengan Komite Hubungan Internasional.

3. *Insiden Dili*

Selama era tahun-tahun delapan puluhan Timor Timur dan masalahnya tidak menganggap masalah untuk kebanyakan orang Indonesia. Ini terjadi karena media massa Indonesia mengikuti peranan pemerintah Indonesia dan tidak membahas soal Timor Timur. Saat itu Timor Timur sudah menjadi bagian Republik Indonesia- propinsi ke-27. Akan tetapi, di mata banyak negara-negara, termasuk Australia, soal Timor Timur jauh dari penyelesaian. Kekerasan di Timor-Timur terus berlangsung karena perlawanan Fretili maka

¹⁶ Pencaplokan militer Timor-Timur adalah operasi yang sangat keras, dalam kekejaman-kekejaman yang menggelisahkan terjadi dan mengenai penduduk sipil. Memang cerita ini terhadap kelakuan Indonesia di Timor-Timur memberi kesan keadaan rakyat Timor-Timur mungkin merupakan kasus yang serius pelanggaran hak asasi manusia yang saat ini dihadapi dunia. Lihat Khairul Jasmi, *Euricos Guterres. Melintas Badai Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm.205-206.

Tentara Indonesia menetapkan strategi *fence of legs* untuk melawan Fretilin¹⁷. Ada perkiraan bahwa lebih daripada seratus ribu (100.000) orang Timor Timur meninggal antara tahun 1976 dan tahun 1980 sebagai akibat tindakan militer, kelaparan dan keadaan sakit.

Akan tetapi di bawah penguasaan Indonesia keadaan di Timor Timur diperbaiki juga, khususnya selama tahun delapan puluhan. Pemerintah Indonesia membangun banyak sekolah, gereja dan rumah sakit. Lagi pula, pemerintah Indonesia juga mengaspal beberapa jalan di Timor Timur. Selama penguasa Indonesia pendapatan rata-rata tiap orang Timor Timur dinaikkan sampai US\$200 pada tahun 1990. Ini masih kurang separo pendapatan rata-rata tiap orang Indonesia tetapi lima kali sebanyak dibanding pendapatan di akhir penguasaan Portugal. Di sisi lain, laporan pemerintah berada yang menyatakan di tujuh puluh lima persen (75%) enam puluh satu (61) Daerah di Timor Timur lebih daripada separo penduduk hidup dalam kemiskinan.

¹⁷ strategi *fence of legs* adalah strategi Indonesia yang memaksa orang Timor-Timur untuk berjalan kaki didepan pasukan Indonesi yang ingin medekati posisi Fretilin, agar Fretilin tidak bisa menembak pasukan Indonesia tanpa melukai orang Timor-Timur. Lihat, Helen Mary Hill, *Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae*. Dili : Yayasan HAK dan Sahe Institute For Liberation Dili, 2000, hlm. 207.

B. Usaha Penyelesaian Masalah Timor-Timur

Salah satu prioritas kebijakan kabinet Reformasi Pembangunan adalah upaya memulihkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap tekad dan kemampuan pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi, social dan politik yang melanda Negara Indonesia. Kesungguhan pemerintah untuk mengupayakan suatu penyelesaian masalah Timor-Timur secara tuntas dinilai akan membantu pemulihan kepercayaan internasional tersebut. Kebijakan Kabinet Reformasi Pembangunan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya integrasi Timor-Timur dengan Indonesia tidak diakui oleh masyarakat Internasional.

Sejak Indonesia menerima permintaan integrasi rakyat Timor Timur melalui partai-partai UDT, APODETI, dan KOTA, dalam suatu Deklarasi Integrasi di Balibo pada tanggal 30 November 1975, Indonesia menganggap Timor Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan Indonesia. Rakyat Indonesia melalui DPR menerima petisi integrasi rakyat Timor Timur tersebut pada tanggal 17 Juli 1976. Timor-Timur berdasarkan UU No. 7 Tahun 1976 ditetapkan sebagai propinsi ke-27, bahkan MPR-RI lebih memperkuatnya dengan mengukuhkan status Timor-Timur tersebut melalui Ketetapan No. VI/MPR/1978. Dengan demikian status Timor Timur sama kedudukannya dengan provinsi-provinsi lain dalam Negara Kesatuan R.I.¹⁸ Sebagai wilayah R.I. masalah Timor Timur sudah tuntas. Dalam pengertian

¹⁸ *Ibid*, hlm. 282.

pemerintah RI hal ini berarti bahwa rakyat Timtim sudah melaksanakan dekolonisasi dan menentukan nasibnya sendiri sesuai resolusi PBB 1514 (XV) 1960 dan 1541 (XV) 1960.

1. PBB

Sebagai Organisasi politik internasional yang utama, perserikatan Bangsa-Bangsa telah lama menjadi medan perdebatan yang paling penting mengenai Timor-Timur. Pembahasan PBB mengenai persoalan Timor-Timur telah dimulai ketika Portugal pertama menjadi anggota badan dunia itu pada tahun 1955, tetapi sampai jatuhnya kediktatoran Portugis tahun 1974, Lisabon menolak mentaati piagam PBB mengenai administrasi wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri.

Dukungan yang diberikan negara-negara sekutu kepada Jakarta menjamin bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa badan dunia yang misi pendirian ditujukan untuk menyelamatkan Generasi-generasi mendatang dari penderitaan akibat peperangan. Tahun 1975 barulah PBB memberikan perhatian pada keadaan di Timor-Timur, khususnya mengenai Dekolonisasi PBB mengadakan rapat di Lisabon tetapi hanya meminta kepada Portugal agar menciptakan keadaan yang memungkinkan rakyat wilayah itu mencapai tujuan yang dikemukakan dalam Deklarasi mengenai pemberian kemerdekaan kepada negeri dan rakyat jajahannya.

PBB tidak ikut campur tangan pada saat peperangan sipil yang dilakukan Indonesia pada Agustus 1975 dan sesudah itu dilanjutkan dengan penyusupan militer Indonesia dari Timor Barat , apabila PBB ikut campur tangan , konflik akan teratasi dengan baik sebelum terjadinya invasi Indonesia. Ketidak bertindakya badan dunia ini disebabkan karena mereka tidak terlalu mendukung adanya invasi dari Indonesia untuk mencaplok kembali Timor-Timur, hal ini juga didukung kurangnya dukungan Negara-negara Barat. Pada waktu PBB mulai mengatasi ini, ini sudah terlambat untuk menghentikan invasi Indonesia.¹⁹

Negara-negara seperti Aljazair, Kuba, Guyana, Senegal, Sierra Leone, Trinidad dan Tobago mengajukan satu resolusi alternative, yang kemudian dikenal dengan “rancangan Aljazair”.²⁰ Komite keempat mengesahkannya ke

¹⁹ Anderson, H. *Australia-Indonesia Relations dalam Regional Dimesnions of Indonesia-Australia Relations*. Jakarta. CSIS,1984, hlm .40

²⁰ Rancangan Aljazair merupakan rancangan yang dibetuk oleh beberapa Negara, Rancangan ini merupakan rancangan mengenai mengecam keras invasi Indonesia untuk mencaplok kembali Timor-Timur dan menuntut agar Indonesia menark mundur tentaranya tanpa menunda-nunda agar memungkinkan rakyat wilayah itu bebas melaksanakan hak mereka atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaannya. Rencana ini juga menyerukan kepada semua Negara agar menghargai hak rakyat Timor-Timur untuk menentukan nasib sendiri, dan meminta Portugal melakukan segala upaya untuk mencapai penyelesaian damai untuk konflik tersebut. Lihat *Joseph Nevins, Pembantaian Timor-Timur : Horor Masyarakat Internasional*, Yogyakarta : Galangpress Yogyakarta, 2008, hlm. 95.

Majelis Umum yang mengadopsi resolusi pada Desember 1975 dengan suara 72 mendukung, 10 menentang, dan 43 abstain. Resolusi Alternatif itu juga meminta Dewan Keamanan untuk melakukan tindakan mendesak untuk melindungi keutuhan wilayah Timor-Timur dan hak rakyatnya atas penentuan nasib sendiri, serta meminta badan Internasional mengirimkan fakta ke wilayah itu secepatnya. Sementara rakyat Timor-Timur mengharapkan pemungutan suara yang lebih kuat.

Pada bulan November 1975 PBB menggambarkan situasi sosial-ekonomi Timor-Timur dengan istilah-istilah yang tidak kalah menyedihkan:

Menurut sebuah publikasi resmi Portugis, di antara faktor-faktor yang merintang pembangunan wilayah ini ialah rendahnya pendapatan per kepala, kurangnya infrastruktur transportasi dan energi, kurangnya tradisi komersial di antara penduduk pribumi, kekurangan pekerja yang berkualifikasi secara teknis di berbagai tingkatan sector publik dan pribadi, kurangnya kemampuan finansial, defisit dalam perdagangan, dan kuatnya pemusatan di proses produksi akan satu produk saja, yaitu kopi.

Kondisi bangsa yang amat menyedihkan ini dibicarakan lebih jauh di kalangan internasional oleh diplomat-diplomat yang mengunjungi wilayah itu setelah tahun 1975. Setelah kunjungan utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Timor Portugis Vittorio Winspeare Guicciardi ke Timor pada awal 1976, Pemerintah Australia melaporkan:²¹

²¹ *Ibid*, hlm. 80

Winspeare begitu terkejut melihat ‘keterbelakangan’ sedikit orang yang ia temui di daerah-daerah pedesaan di pinggiran kota dan mengatakan, bahwa sangat sulit membayangkan mereka dapat memahami segala persoalan seputar tindakan penentuan nasib sendiri. Ia begitu ‘terkesima’ bagaimana ‘primitifnya’ kondisi sebagian orang, contohnya yang ia temui di wilayah kantong Oecussi. Ia mengatakan, bahwa ia yakin hidup mereka tidak banyak berubah setelah 500 tahun kekuasaan Portugis.

2. Pendekatan Melalui ABRI

Kehadiran dan peranan ABRI di Timor-Timur merupakan salah satu aspek integral yang cukup penting. Semua pihak mengakui bahwa ABRI aktif berperan sehingga kegiatan pembangunan di Timor-Timur dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian partisipasi ABRI dalam membangun masyarakat kiranya sedapat mungkin menciptakan etos kerja dalam nurani warga Timor-Timur, agar tidak muncul kesan bahwa warga masyarakat sipil hanya tinggal menerima.²²

ABRI tidak hanya dipandang sebagai pengaman untuk membersihkan GPK, melainkan lebih penting dari itu untuk mengintensifkan pembangunan di seluruh kawasan Timor-Timur. Salah satu ciri terpenting dalam kehidupan sistem politik demokrasi pancasila ini adalah hadirnya ABRI ini, melalui

²² P. Gregor Neonbasu, SVD, *Peta Politik dan Dinamika Pembangunan Timor-Timur*, Jakarta : Yanense Mitra Sejati, 1997, hlm. 161.

angkatan bersenjata ini merupakan kekuatan pertahanan dan keamanan negara dan sekaligus sebagai kekuatan sosial politik.

3. *Pendekatan Pemerintah*

Adanya tekad bulat dari hati nurani rakyat Timor-Timur untuk menentukan nasibnya sendiri maka terjadilah Deklarasi Balibo pada tanggal 30 November 1975. Pemerintah dan rakyat Republik Indonesia menyambut baik adanya deklarasi tersebut dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tanggal 17 Juli²³. Strategi awal pembangunan di Timor-Timur ditempuh dengan Crash Program yang dilaksanakan dalam tiga tahap , yakni :

- 1) Tahap pembangunan Rehabilitasi : Pada tahun 1976-Maret 1977 sasaran utama pembangunan dalam tahap pertama ini adalah merehabilitasi seluruh prasarana dan sarana umum seperti rumah sakit, balai pengobatan, sekolah, sarana telekomunikasi dan perhubungan.
- 2) Tahap pembangunan Konsolidasi : April 1977-Maret 1978 sasaran utama adalah melanjutkan serta meningkatkan langkah-langkah pembangunan sebelumnya sehingga menjangkau penataan dan perbaikan yang lebih luas. Misalnya pemantapan aparatur

²³ Soekanto, *loc, cit.*

pemerintahan, peningkatan dan pembangunan ekonomi rakyat, peningkatan prasarana dan sarana pendidikan.

- 3) Tahap pembangunan Stabilisasi : April 1978-Maret 1979 sasaran utamanya langsung diarahkan kepada pemantapan serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan aparat pemerintahan daerah secara menyeluruh dan terpadu.²⁴

²⁴ *Ibid*, hlm. 169.